

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DSPM) KOTA BONTANG

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN

A. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1		2	3	4	5	6	7
1	Informasi Tentang Profil DSPM Kota Bontang						
a.	Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	<p>Kedudukan DSPM Kota Bontang</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang:</p> <p>Berdasarkan Keputusan wali kota Bontang nomor 483 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang perubahan atas keputusan wali kota nomor 402 tahun 2016 tentang penetapan gedung dan alamat kantor perangkat Daerah</p> <p>Perda Kota bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>Berdasarkan Peraturan wali kota Bontang Nomor 41 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang kedudukan,susunan organisasi,Tugas, dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2019	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Website DSPM dan Cetak

b.	Rencana Strategis DSPM Kota Bontang (RENSTRA)	Rencana Strategis DSPM Tahun 2017-2021 merupakan dokumen rencana strategis diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DSPM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website DSPM
c.	Struktur dan Profil OPD	Struktur Organisasi dan Profil DSPM dan Pemberdayaan Masyarakat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website DSPM
d.	Data SDM DSPM	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website DSPM
e.	TUPOKSI	Tugas, wewenang, fungsi (perwali)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website DSPM
f.	Kedudukan dan domisili	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website DSPM
2	Ringkasan Program dan Kegiatan DSPM						
a.	Program dan Kegiatan	Nama Program dan Kegiatan	Sekretaris/Kepala Bidang	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website DSPM
b.	Pelaksana dan Penanggung Jawab	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Sekretaris/Kepala Bidang	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website DSPM
c.	Capaian Program dan Kegiatan	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website DSPM
d.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan (rencana aksi)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website DSPM
e.	Anggaran	Nilai Anggaran	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website DSPM
f.	Agenda Dinas	Agenda penting DSPM					

		Hari Pahlawan	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website DSPM
		Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				Website DSPM
		Hari Kesatuan Gerak PKK	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat				Website DSPM
		Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) (29 Mei 2019)	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
		Verifikasi Dan Validasi Data BDT,PFM,dan OTM	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kasi Data PMKS,PSKS				
		Hari Ulang Tahun TAGANA (25 Maret 2019)	Kepala Bidang Litjamsos,Kasi Penanganan Bencana				
		- Rencana pelaksanaan Diklat dll.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website DSPM
		Bimtek SIKS-NG	Kepala Bidang Fakir miskin				
		Monev Penyaluran BPNT,Bantuan Sosial Lainnya	Kepala Bidang Fakir miskin dan Bidang Litjamsos				
		Pendampingan Produta	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
		Gelar Teknologi Tepat Guna	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
		Saksi Pengundian Doorprise.	Kabid Linjamsos,Kasi Kelembagaan				
3	Informasi Keuangan DSPM Kota Bontang						
a.	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DSPM Kota Bontang	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website DSPM
b.	Dokumen Anggaran	Dokumen Anggaran DSPM Kota Bontang	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website DSPM
c.	Dokumen RKA	Dokumen Rencana Kerja Operasional Kegiatan DSPM Kota Bontang	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website DSPM
4	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan DSPM						

a.	Informasi Kinerja Satuan	Ringkasan Informasi Kinerja	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website DSPM
b.	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tahunan	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	Website DSPM
c.	Laporan Layanan Informasi	Laporan Layanan Informasi Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tahunan	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun setelah ditetapkan	Meja Layanan Informasi
d.	Peraturan dan Keputusan	Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh DSPM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tahunan	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun setelah ditetapkan	Website DSPM
e.	Informasi Barang dan Jasa	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (RUP)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Setiap kegiatan	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	Sirup
1)	Informasi Perencanaan Barang dan Jasa	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (RKBU)	PA, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tiap proses pengadaan	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	Website DSPM dan papan pengumuman
2)	Informasi Tentang Proses Pengadaan	Pengumuman proses pengadaan	PA, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tiap proses pengadaan	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	Sirup
30	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bontang	26 jenis PMKS di Kota Bontang	Bidang Dayasos FM, Resos, Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
		Jumlah data PMKS di Kota Bontang	Bidang Dayasos FM, Resos, Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
		Penanganan pelayanan berupa rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Bidang Dayasos FM, Resos, Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
		Prosedur Penanganan pelayanan berupa rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Bidang Dayasos FM, Resos, Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
31	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Bontang	Jumlah data PSKS di Kota Bontang	Bidang Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
		Pembinaan dan pemberdayaan PSKS	Bidang Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
32	Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Pengurus LPM, SK LPM	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak

33	Data Stratifikasi posyandu	Nama Posyandu, Alamat, Stratifikasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
34	SPS Sejenis Binaan PKK	Nama SPS, Alamat SPS, Jumlah Anak didik, Pengelola dan Pendidik.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
35	Data Basis Terpadu	Jumlah data PMKS di Kota Bontang	Bidang Dayasos FM, Resos, Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
36	Penerima Bantuan Iuran	Jumlah penerima PBI di Kota Bontang	Bidang Dayasos FM, Resos, Linjamsos	2019	Softcopy dan Hardcopy	selama berlaku	Website DSPM dan Cetak
37	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Kepala Bidang Linjamsos, Kasi Jaminan Sosial				
38	Data Jenis Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)	Nama Alat, Gambar, Kegunaan, cara kerja, Nama Pencipta TTG	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kasi TTG	2019	Softcopy dan Hardcopy		Website DSPM dan Cetak
38	Produk Olahan	Nama Produk, foto, Cara membuat dan nama pembuat olahan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kasi TTG	2019	Softcopy dan Hardcopy	Setelah Kegiatan	Website DSPM dan Cetak
39	Rekapitulasi Jumlah RT Se Kota Bontang	jumlah RT	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kasi TTG	2019	Softcopy dan Hardcopy	Setelah Kegiatan	Website DSPM dan Cetak

B. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Infomasi Setiap Saat DSPM Kota Bontang						
1	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik DSPM Kota Bontang	Pejabat Struktural	2019	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website DSPM dan Cetak

		Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat tanggal 01 September 2019 Nomor 343 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.					
2	Peraturan dan Kebijakan	Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan Badan Publik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Website DSPM dan Cetak
3	Informasi yang diberikan secara Berkala	Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	Pejabat Struktural	2019	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Website DSPM dan Cetak
4	Informasi Surat Perjanjian	Surat menyurat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Sub Bag Umum dan kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Website DSPM dan Cetak
5	Informasi tentang Perizinan	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya.	Kepala Bidang Litjamsos, Kasi Kelembagaan sosial dan PSKS	2019	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Website DSPM dan Cetak
6	Data inventaris	Data Inventaris	Sub Bag Umum dan kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Website DSPM dan Cetak
7	Agenda Kerja	Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja	Sub Bag Umum dan kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Website DSPM dan Cetak
8	Data Pelanggaran Pegawai	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Sub Bag Umum dan kepegawaian	2019	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Website DSPM, Papan Agenda dan display

C. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontak Person Darurat	Pihak yang Dapat Dihubungi (Peksos, Santunan Kematian, PKH, Tagana, Rumah Singgah)	Pejabat Struktural	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Website DSPM dan Cetak

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JUDUL INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Biodata ASN	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h			• Melanggar HAM	
2	Dokumen/Berkas/Arsip ASN	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h			• Melanggar HAM	
3	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h			• Melanggar HAM	
4	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h			• Melanggar HAM	
5	Penilaian Prestasi ASN	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan Konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf			• Melanggar HAM	
		- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6				
6	Data rekam medis ASN	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS	• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10)			• Dapat merugikan PNS	• Untuk melindungi Keamanan dan Kenyamanan PNS
					• Melanggar HAM	

7	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan ASN	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
9	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
10	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Untuk menjaga penilaian yang obyektif	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
11	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran Berjalan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan/me ngganggu proses kegiatan/administrasi pembukuan	Terbatas sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Auditor yang berkompeten	Menghambat proses kegiatan/administ rasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tert ibnya proses administrasi pembukuan.
12	a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler b. Laporan Hasil pemeriksaan Kasus c. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus d. Review Laporan Keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 Tahun	LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.	Tak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

14	Internet Protocol / IP Adress Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE, pasal 30	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan	Tak terbatas	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses
15	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE, pasal 30-37	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan	Tak terbatas	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi hak akses
17	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE, pasal 1 angka 16	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan	Tak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
18	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j. - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE, pasal 30-37 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan	Tak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
19	Sistem Management Database	UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan	Tak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
20	Yang dapat menghambat proses penegakan hukum	Pasal 17 huruf a angka 1- 5 UU KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dll	30 tahun	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Sebaliknya
23	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Pasal 17 huruf h angka 1-5 UU KIP	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sebaliknya
24	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Pasal 17 huruf l UU KIP	Dapat mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan	Ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan	Sebaliknya

26	a. Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat.	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Memuat Riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya
	b. Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi Nama, Foto, Alamat dan Riwayat Hidup					
27	Data Pribadi Penerima manfaat Penghuni Rumah Singgah	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Memuat Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya
28	Lokasi Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Jika diketahui oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan	Tidak terbatas	Apabila diketahui maka keamanan klien dapat terancam	Klien terlindungi
29	Data Pribadi Penerima Manfaat dalam RPTC	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 2	Jika dibuka maka akan berpotensi memparah kondisi perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.	Tidak terbatas	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data Pribadi akan terjaga kerahasiaannya
30	Data Pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bontang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 2	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data Pribadi akan terjaga kerahasiaannya

31	Data Penerima Bantuan Iuran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 2	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data Pribadi akan terjaga kerahasiaannya
32	Basis Data Terpadu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 2	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data Pribadi akan terjaga kerahasiaannya
33	Identitas Pelapor dan isi Laporan PMKS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 2	Jika diketahui oleh orang/pihak lain berpotensi penyalahgunaan.	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)	Menimbulkan keengganan masyarakat melaporkan	Memberikan jaminan keamanan terhadap pelapor
34	Identitas Pelapor dan Isi laporan dugaan praktek korupsi	Pasal 15 UU no.30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Dapat menghambat proses hukum	Hingga mendapat persetujuan dari pihak terkait	Menimbulkan keengganan masyarakat melaporkan tindakan korupsi	Memberikan jaminan keamanan terhadap pelapor
34	Dokumen Laporan Pendampingan Prodata	Pasal 17 UU no. 14 tahun 2008, tentang KIP	Dapat menimbulkan situasi yang kurang kondusif antar lembaga	Terbatas	Memicu Konflik antar lembaga	Hubungan antar lembaga Kondusif

36	Dokumen Penawaran Kontrak	Pasal 17 UU no. 14 tahun 2008, tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan tidak sehat	Hingga selesai pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian
----	---------------------------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------